

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap berbagai tulisan terdahulu dari para pakar sejarah dan politik yang membahas mengenai Partai Kongres, Liga Muslim, dan masalah pembagian India menjadi dua negara dominion pada tahun 1947. Penulis membandingkan isi dari setiap karya literatur dan mengidentifikasi sudut pandang setiap penulis buku terhadap subjek-subjek yang dibahasnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan India tahun 2011, dalam kajian pustaka penulis menjelaskan posisi/pendirian penulis disertai alasan-alasannya.

Telaah terhadap karya-karya terdahulu dimaksudkan untuk menampilkan “mengapa” dan “bagaimana” hasil tulisan dari pakar-pakar terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan skripsi ini. Terdapat tiga subpokok bahasan yang dijadikan landasan penyusunan bab ini. Pertama, peranan politik Partai Kongres dan Liga Muslim 1935-1947; kedua, pembagian India menjadi dua negara dominion (India dan Pakistan); ketiga, kondisi Politik India dan Pakistan tahun 1947 setelah Pembagian.

#### **2.1. Peranan Partai Kongres dan Liga Muslim 1935-1947**

Peranan politik terbangun atas dua konsep dasar yaitu “peranan” dan “politik”, untuk menjabarkan apa yang dimaksud peranan politik dalam konteks penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa pendapat para ahli ilmu politik

dan sosiologi mengenai kedua konsep tersebut. Peranan merupakan konsep yang berasal dari ilmu sosiologi, menurut Pratama dkk. (tersedia di: <http://ardee.web.id/blog/2012/03/06/> ..., 30 Desember 2012) suatu peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma terkait posisi dan tempat (kedudukan) dalam masyarakat;
- b) Peran merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu (atau organisasi) dalam masyarakat;
- c) Peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu jalinan atau pola hubungan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu antara lain kelompok-kelompok sosial, institusi sosial, norma sosial dan stratifikasi sosial.

Budiardjo (2008: 18) mendefinisikan politik sebagai seluruh kegiatan manusia yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Politik erat kaitannya dengan kehidupan bernegara, apa yang akan penulis bahas lebih jauh dalam skripsi ini menyangkut berbagai aktivitas politik yang berlangsung dalam suatu negara, dalam konteks di sini adalah India dalam periode 1935-1947 yang pada saat itu masih berada dalam kekuasaan imperialisme Inggris. Budiardjo (2008: 14) memaparkan bahwa politik dalam suatu negara (*states*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).

Berdasarkan pada pendapat Pratama dan Budiardjo di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan politik mencakup perilaku-perilaku dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat oleh individu atau kelompok-kelompok politik tertentu, yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan politik dalam masyarakat. Kelompok-kelompok politik yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Partai Kongres dan Liga Muslim. Sebelum lebih jauh membahas mengenai kedua partai ini, terlebih dahulu perlu sedikit dibahas makna dari partai politik pada masa pergerakan kemerdekaan sesuai dengan konteks historisnya.

Partai politik lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi dari bangkitnya kesadaran nasional (Budiardjo, 2008: 423). Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Asshiddiqie yang dikutip dari (<http://ardee.web.id/blog/>, 30 Desember 2012) bahwa partai politik merupakan bentuk pelembagaan dari ide-ide, gagasan-gagasan, serta cita-cita politik, berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya. Berdasarkan dua pendapat tersebut, peranan politik Partai Kongres dan Liga Muslim sebagai dua partai politik yang lahir dalam masa pergerakan, meliputi upaya-upaya yang dilakukan oleh keduanya dalam memperjuangkan nilai-nilai, gagasan-gagasan, serta cita-cita kemerdekaan India agar lepas dari penjajahan Inggris.

Skripsi ini akan banyak membahas mengenai perubahan politik yang ditimbulkan oleh Partai Kongres dan Liga Muslim berkaitan dengan peranan politiknya sebagai partai pergerakan kemerdekaan India selama periode 1935-1947. Penulis menekankan pada aspek perubahan karena hakikat dari sejarah adalah perubahan-perubahan penting yang disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia pada masa lalu. Perubahan politik yang dimaksud dalam skripsi ini

adalah mengenai transisi kepemimpinan dari pemerintahan imperialisme Inggris ke tangan bangsa India, yang ditandai dengan berakhirnya rejim imperial Inggris di India, serta munculnya dua negara baru yaitu India dan Pakistan.

Hardgrave dan Kuchanek (1970: 37) memaparkan bahwa Partai Kongres didirikan oleh A. O. Hume dan Banerjea pada tahun 1885, awalnya bertujuan untuk mengumpulkan berbagai kaum elit India (kaum cendikia, penulis, guru, ahli hukum, dll.) dari berbagai golongan (Hindu, Muslim, Sikh, dan Anglo-Hindu) untuk menuntut agar Inggris memberikan ruang yang lebih luas bagi rakyat India untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Bunyi tuntutananya "*the germ of Native Parliament*" mereka meminta agar Inggris menyediakan tempat di parlemen, bagi perwakilan rakyat pribumi India.

Hardgrave dan Kochanek (1970:36) membagi fase perkembangan partai kongres dari 1885-1947 ke dalam tiga periode berdasarkan karakteristik dari pola gerakannya serta para pemegang kepemimpinan yang menjadi penentu dalam partai tersebut. Pertama, periode Moderat (1885-1905) diisi oleh golongan elit yang bersifat moderat, yang menjadi tuntutanannya masih dalam tataran partisipasi rakyat India dalam pemerintahan Inggris-India dan belum ada konsesi mengenai kemerdekaan India dari kolonialisme Inggris. Kedua, periode ekstrimis (1905-1920) ditandai dengan naiknya kaum ekstrimis Hindu dalam kepemimpinan Partai Kongres, Bahadur Tilak tampil sebagai sosok yang paling berpengaruh yang menjadikan gerakan Partai Kongres bersifat radikal dan menggunakan cara-cara kekerasan yang memicu timbulnya berbagai kerusuhan komunal.

Ketiga, Periode Gandhian atau disebut juga *Gandhian Era* (1920-1947), sepeninggalan Tilak, muncul sosok Gandhi yang juga menentang kolonialisme

Inggris. Walau pun bersifat non-kooperatif seperti halnya Tilak, namun Gandhi tidak suka dengan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh pendahulunya itu. Dia banyak menggunakan cara-cara yang halus dalam menentang kolonialisme Inggris di India dengan perjuangan tanpa kekerasannya, yaitu dengan melakukan aksi *civil disobedience* (aksi mogok), dan memobilisasi rakyat India untuk tidak menggunakan produk-produk Inggris dengan prinsip ekonominya Swadesi, satyagraha perjuangan dengan kebenaran, dan tidak berpartisipasi dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga hukum Inggris di India.

Pembagian periode perkembangan Partai Kongres antara tahun 1885-1947 oleh Hardgrave dan Kuchanek di atas menunjukkan bahwa ia hanya mengidentifikasi gerakan partai tersebut dengan tokoh tertentu saja. Periode 1920-1947 hanya diidentifikasi dengan satu tokoh saja yaitu Gandhi, penulis memandang bahwa apa yang digambarkan Hardgrave dan Kuchanek itu parsial, ada banyak peran-peran dari para partisipator sejarah India yang teralienasi. Menurut penulis peranan politik Gandhi yang paling kuat dalam Partai Kongres hanya sampai pada tahun 1929, karena pada periode selanjutnya Gandhi telah digantikan oleh masuknya sosok Nehru, dan beberapa politikus lainnya seperti Bose, Patel, Prasad, dll. yang banyak berpengaruh dalam pergerakan Partai Kongres di parlemen.

Gandhi beralih pada peranannya dalam gerakan kelas bawah pada periode 1935-1947 dan baru terlihat setelah ia memobilisasi rakyat India dalam gerakan *Quit India* pada tahun 1942. Menurut penulis gerakan Partai Kongres menemukan karakteristiknya yang baru sejak tahun 1935, ketika Inggris mengeluarkan *India Government Act 1935* yaitu undang-undang baru, yang banyak menciptakan

perubahan dalam perpolitikan India. Undang-undang tersebut juga mendorong Partai Kongres untuk mengubah strategi pergerakannya yang semula bertumpu pada aksi protes di jalanan, kembali pada polanya yang lama yaitu dengan melakukan gerakan di tataran elit politik.

Kajian mengenai peranan politik Partai Kongres dan Liga Muslim dalam periode 1935-1947 banyak dibahas dalam buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai sejarah politik dan pergerakan kemerdekaan India. Buku pertama sebuah karya dari Moraes yang berjudul *India Today* (1960), fokus kajiannya terletak pada pengaruh nilai-nilai Hinduisme dalam tatanan politik India pada masa pra-kemerdekaan dan setelahnya. Menurut Moraes konsep nilai-nilai Hinduisme bukan hanya sekedar agama bagi rakyat India, namun juga merupakan acuan berbagai macam tindakan di dalam masyarakat. Ia menambahkan bahwa Hinduisme telah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat India baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, dan politiknya (Moraes, 1960: 3). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya peran agama dalam kehidupan politik di India, hal itu cukup memberikan penjelasan awal pada penulis mengapa antara periode 1935-1947 isu agama menjadi sangat sensitif, sehingga mengatarkan bangsa India pada perpecahan yang berujung pada pembagian pada tahun 1947.

Pembahasan Moraes mengenai pergerakan kemerdekaan India yang dilakukan oleh Partai Kongres dan Liga Muslim menekankan pada konflik-konflik politik yang terjadi dalam tubuh Partai Kongres sebagai pemicu terpecahnya pergerakan kemerdekaan di India. Di satu sisi Partai Kongres berperan sebagai pemersatu berbagai golongan di India dan merupakan mesin politik bagi kemerdekaan India. Namun, di sisi lain Partai Kongres menjadi

ajang persaingan berbagai kelompok yang ada di India terutama antara mayoritas Hindu dan minoritas terbesar Muslim.

Moraes dalam bukunya kurang begitu mengangkat mengenai peranan politik Liga Muslim dalam gerakan kemerdekaan India. Namun, Moreas pada salah satu bagian dalam bukunya menjelaskan mengenai akar konflik yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan antara Partai Kongres dan Liga Muslim dalam periode 1935-1947. Moraes hanya terfokus pada sosok Gandhi dan kurang mengangkat peran-peran tokoh lain di Partai Kongres. Sosok-sosok seperti Nehru, Bose, dan Muhammad Kallam Azab tidak terlalu muncul, padahal mereka tokoh-tokoh yang juga cukup menentukan dalam kemerdekaan India.

Herman Kulke dan Dietmer memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Moraes dalam bukunya yang berjudul *A History of India (fourth edition)* (2004), mereka dalam bukunya banyak membahas mengenai kondisi India dalam periode akhir kekuasaan Inggris di India antara tahun 1935-1947. Kulke cukup berimbang dalam menjelaskan peranan masing-masing tokoh utama yang memiliki pengaruh kuat dalam perpolitikan India, baik yang berasal dari Partai Kongres seperti Nehru, Gandhi, dan Bose, maupun dari Liga Muslim seperti Ali Jinnah dan Rahman Ali Khan. Tulisannya mengarahkan sudut pandang pembaca untuk memahami kondisi politik India pada periode 1935-1947 dimulai dari keluarnya *India Government Act 1935*.

*India Government Act 1935* digambarkan oleh Kulke dan Dietmer sebagai pemicu timbulnya perpecahan antara golongan Hindu dan golongan Muslim. Dia juga banyak mengangkat peranan dari Ali Jinnah sebagai perwakilan dari Liga Muslim yang dianggap sebagai tokoh kunci dari perjuangan Muslim India untuk

mendirikan Pakistan agar terpisah dari India. Periode 1935-1947 bagi Kulke dan Dietmer merupakan sebuah ajang persaingan politik yang terjadi di India antara Partai Kongres dan Liga Muslim dalam memperoleh legitimasi politik dari rakyat India. Masuk tahun 1946 Masing-masing partai memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, Partai Kongres di delapan provinsi, sedangkan Liga Muslim di tiga provinsi (Bengal, Punjab, dan Sind).

Kelemahan tulisan Kulke dan Dietmer adalah terlalu menekankan pada faktor-faktor ekstern seperti Perang Dunia II dan ancaman serangan Jepang sebagai faktor-faktor yang paling menentukan dalam menentukan kondisi politik dalam negeri India pada tahun 1947. Hal itu melahirkan pandangan bahwa bangsa India hanya mampu bereaksi dari pada memiliki inisiatif sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari pihak Inggris. Kurangnya pendekatan kultural oleh Kulke dan Dietmer dalam memahami sosok seperti Jinnah, Nehru, dan Gandhi yang semuanya digambarkan dengan cara pandang Barat terhadap orang Timur.

Judith E. Walsh dalam bukunya yang berjudul *A Brief History of India* (2006) juga membahas mengenai dampak-dampak dari *India Government Act 1935* terhadap perkembangan politik India antara tahun 1935-1947. Ia banyak memaparkan mengenai proses politik yang berlangsung di parlemen India dalam kurun waktu 1937-1947 antara Partai Kongres dan Liga Muslim. Dalam kajiannya Walsh menemukan persaingan yang timbul antara kedua partai tersebut, yang disebabkan oleh sistem pemilihan terpisah yang diterapkan oleh Inggris pada tahun 1937 berdasarkan *India Government Act 1935*.



Pemilihan parlemen provinsi pada tahun 1937 berdampak pada merenggangnya hubungan politik antara Partai Kongres dan Liga Muslim dalam kurun waktu 1937-1947. Kekalahan Liga Muslim dalam pemilihan semakin menguatkan para tokoh politik Muslim untuk sadar dalam menjaga posisi politiknya di India yang terancam oleh dominasi Partai Kongres. Liga Muslim sebagai perwakilan dari golongan Muslim, sejak tahun 1940 memimpin sebuah upaya menuju pembentukan negara Pakistan yang wilayahnya adalah provinsi-provinsi di India yang dikuasai oleh Muslim meliputi Punjab, Sind, Benggala, dan Northwest Frontier Province.

Kelemahan dari kajian Walsh mengenai perkembangan politik India dan perjuangannya dalam memperoleh kemerdekaan adalah terlalu terfokus pada pembahasan mengenai pemilihan parlemen provinsi saja. Sedangkan, kondisi politik setelah pemilihan dan masa pemerintahan Partai Kongres dan Liga Muslim di parlemen tidak dipaparkan terlalu banyak oleh Walsh. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Partai Kongres dan Liga Muslim tidak lebih dari dua partai yang berambisi untuk berkuasa di India dengan mengorbankan kepentingan dari rakyat banyak.

Buku selanjutnya sebuah karya dari TSG. Mulia berjudul *India; Sedjarah Politik dan Pergerakan Kemerdekaan* (1959), yang banyak membahas mengenai kondisi politik India pada masa pergerakan kemerdekaan sejak permulaan abad ke-19 sampai petengahan abad ke-20. Pada periode 1935-1947 baik Partai Kongres maupun Liga Muslim digambarkan keduanya berkembang dengan pesat, dan banyak wakil-wakil dari kedua partai ini yang mengisi jabatan-jabatan pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun pusat. Aspek yang perlu dikritisi

dari tulisan Mulia, yaitu terletak pada sudut pandangnya yang terlalu nasional sentris.

Mulia menggambarkan posisi bangsa India sebagai pihak yang lemah dirugikan, dan menderita sebagai korban dari kolonialisme Inggris. Dia dalam bukunya terlalu mensucikan faham nasionalisme dalam pengertian yang asketis. Hal tersebut membuka ruang bagi munculnya interpretasi baru dewasa ini, ketika nilai-nilai nasionalisme telah berevolusi. Terjadi semacam bias zaman yang menyebabkan adanya perbedaan antara sudut pandang manusia saat ini dengan masa lalu terhadap fenomena-fenomena nasionalisme dan kemerdekaan.

R. C. Majumdar *at. al.* (1950) dalam bukunya yang berjudul *An Advance History of India*, ia memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Mulia. Perspektif Majumdar bersifat *western centris*, kolonialisme Inggris digambarkan dengan positif yang dianggap olehnya telah membawa India pada modernitas dan kemajuan. Majumdar lebih banyak membahas mengenai berbagai kebijakan Inggris yang berdampak positif bagi kemajuan rakyat India yang digambarkan olehnya terbelakang dan percaya pada takhayul. Munculnya berbagai gerakan kemerdekaan tidak terlepas dari berbagai program pendidikan yang dilakukan oleh Inggris di India. Sehingga, mendorong munculnya kelompok menengah baru (*the new middle class*) yaitu para kaum cendikia yang memperoleh pendidikan Inggris.

Majumdar memaparkan mengenai proses pergerakan kemerdekaan di India dengan pola aksi-reaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok pergerakan kemerdekaan dengan pihak kolonial Inggris. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Inggris merupakan bentuk reaksi terhadap berbagai macam aksi protes yang

dilakukan oleh rakyat. Sebaliknya, berbagai aksi protes rakyat biasanya timbul dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Inggris di India. Majumdar menyebut periode 1935-1947 sebagai fase akhir dari kekuasaan Inggris di India, yang ditandai pertama dengan munculnya dua partai pergerakan yaitu Partai Kongres dan Liga Muslim yang masing-masing didukung oleh basis massa yang kuat dari golongan Hindu dan golongan Muslim. Kedua, semakin kuatnya desakan rakyat India dalam menuntut kemerdekaan India dari Inggris.

## **2.2. Pembagian India menjadi dua negara dominion (India dan Pakistan)**

Pembagian India-Pakistan (1947) dalam berbagai karya Historiografi biasa disebut dengan istilah “*partition*”. Konsep “*partition*” dalam bahasa Inggris bermakna “pembagian”, istilah ini berkembang tidak lama setelah India terbagi menjadi dua negara dominion berdasarkan golongan agama pada tahun 1947. Pandey dalam bukunya menjelaskan mengenai perkembangan konsep *partition* dalam menggambarkan peristiwa historis terbagi India dan Pakistan pada tahun 1947, sebagai berikut:

*“Along with vernacular equivalents like batwara, vib-hajan and taqseem, and other local terms for the violence of the time that I shall have occasion to discuss below, the English word ‘Partition’ has come to be used in the region of Punjab and Delhi, UP (Uttar Pradesh) and Bihar, Bengal and beyond, for the events (or some of the events) that marked the establishment of India and Pakistan, the Hindu-Muslim discord of that moment and the fratricide (or ‘civil war’) that occur red in 1947. In Bangladesh, many ordinary peasants and labourers, speaking in the common Musalmani Bengali of the rural poor, refer to 1947 as ‘partitioner bacchar’ (the year of Partition), as they refer to 1971 as ‘svad-hintar [or mukti-juddher] bacchar’ (the year of Independence, or ‘of the liberation war’ – referring to the massacres and widespread resistance and fighting that came with the Pakistani ar my’s actions of that year) (Pandey: 2004, 14).*

Pandey dalam kutipan di atas, memaparkan bahwa konsep *partition* bukan hanya sekedar menjadi bahasa historiografi, namun juga familiar dalam masyarakat India maupun Pakistan yang digunakan di beberapa kawasan di antaranya Punjab dan Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, dan Benggala. Bahkan, konsep tersebut telah diserap dalam bahasa daerah dikenal istilah '*partitioner bacchar*' (tahun pembagian/*the year of partition*) istilah yang digunakan oleh penduduk Bangladesh (Pakistan Timur) dalam memperingati peristiwa historis pembagian India dan Pakistan pada tahun 1947. Namun, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep "pembagian" menggantikan konsep "*partition*" dalam bahasa Inggris untuk mendeskripsikan peristiwa terbaginya India menjadi dua negara dominion oleh Inggris.

Pakistan merupakan kawasan yang didominasi oleh penduduk Muslim, kawasannya terbagi dua antara Pakistan Barat yaitu wilayah yang terdiri dari provinsi Sind, Punjab bagian barat, Northwest Frontier Province, dan kawasan *princely states* Balukistan. Pakistan Timur merupakan kawasan yang dulunya adalah provinsi Benggala yang di bagi dua pada tahun 1947, dimana Benggala bagian timur yang penduduknya mayoritas Muslim memilih untuk masuk dalam Pakistan, sedangkan yang barat masuk pada India. Sejak tahun 1971 Pakistan Timur melepaskan diri dari Pakistan Barat dan berubah menjadi negara yang sekarang kita kenal dengan nama Bangladesh.

Kawasan-kawasan India meliputi seluruh bekas daerah jajahan Inggris di India di luar daerah-daerah yang disebutkan di atas. Namun, beberapa kawasan yang masuk dalam kategori *tribal* dan *princely states* menjadi bahan perebutan

antara India dengan negara-negara tetangganya. Contohnya Kashmir yang sampai sekarang belum selesai permasalahannya diperebutkan oleh India dan Pakistan.

India dan Pakistan resmi merdeka dari Inggris pada tahun 1947 dengan status dominion. Status Dominion berdasarkan hasil ketetapan *Imperial Conferences* (1926) adalah hubungan antara *Great Britain* (Inggris Raya) dengan para dominionnya (negara-negara merdeka bekas jajahannya) sebagai ‘komunitas otonom’ yang terangkum di dalam Kerajaan Inggris, yang setara tidak ada subordinasi (penguasaan) satu dengan yang lainnya dalam berbagai aspek baik dalam kepentingan domestik maupun kepentingan luar negerinya. Negara-negara dominion tersebut dipersatukan dalam sebuah kesetiaan terhadap mahkota Inggris. Mereka mengakui monarki Inggris sebagai kedaulatannya, dan secara bebas tergabung sebagai anggota dari negara persemakmuran Inggris (*British Commonwealth of Nations*) (tersedia di: <http://www.britannica.com/EBchecked>, 24 Agustus 2012).

Kajian sejarah politik mengenai pembagian India-Pakistan pada tahun 1947 ditulis baik oleh penulis yang berkebangsaan India dan Pakistan maupun para penulis dari luar bangsa India. Namun, setiap tulisan memiliki perspektif yang berbeda terutama dalam mengidentifikasi mengenai faktor-faktor penyebab terbaginya India menjadi dua negara dominion pada tahun 1947. Wali Khan dalam bukunya yang berjudul *Facts are Facts; The Untold Story of India's Partition* (2004), ia membahas mengenai perpecahan politik di India setelah masa akhir penjajahan Inggris, dan ketika Inggris membagi India menjadi dua negara dominion (India dan Pakistan) pada tahun 1947.

Khan melakukan kajian terhadap berbagai dokumen yang diperolehnya dari pusat dokumen di Inggris. Hal yang menarik dari bukunya adalah perspektif Khan yang berbeda dari kebanyakan tulisan yang membahas mengenai sejarah kemerdekaan India, yang terlalu mendewakan sosok Gandhi dan perjuangan Partai Kongres. Khan dalam bukunya memberikan sebuah perspektif dengan mengangkat peranan dari gerakan politik Muslim India dengan mesin politiknya Liga Muslim, yang berupaya untuk lepas dari kekusaan Inggris dan Hindu (Partai Kongres).

Khan mengantarkan pembaca pada sebuah pemikiran bahwa terbaginya India menjadi dua negara (India-Pakistan) pada tahun 1947 merupakan kreasi dari permainan politik antara Liga Muslim dan Inggris. Menurut Khan pemisahan India-Pakistan dianggap merupakan sesuatu yang disengaja oleh Inggris, dengan menebarkan bibit-bibit komunalisme dalam masyarakat India selama masa penjajahan Inggris di India. Seperti dengan membuat kebijakan sistem elektoral terpisah (pemilihan anggota parlemen dan dewan menteri) berdasarkan golongan-golongan (*communal award*) dengan keluarnya *India Government Act 1919* dan penyempurnaannya *India Government Act 1935*.

Khan berpendapat bahwa *India Government Act 1935* dibuat oleh Inggris untuk memecah belah antara golongan Hindu dan golongan Muslim di India. Hal yang perlu dikritisi dari tulisan Khan adalah penggambaran mengenai Partai Kongres dan Inggris yang bersifat antagonis, dan upaya dari penulis dalam membentuk citra Muslim sebagai korban dari dominasi politik Partai Kongres. Upaya tersebut melegalkan tindakan separatisme yang dilakukan oleh Liga Muslim dengan membentuk Negara Islam Pakistan.

Zirring berjudul *Pakistan at the Crosscurrent of History* (2003), yang membahas mengenai perkembangan politik Pakistan sejak masih bergabung dengan India. Zirring dalam bukunya memberikan penekanan pada sosok Ali Jinnah sebagai tokoh sentral dalam pergerakan Liga Muslim untuk mendirikan negara Pakistan. Walau fokusnya pada gerakan politik Muslim, namun buku ini ditulis oleh penulis Barat sehingga tidak seperti Khan yang cenderung terasa sentimen komunal dalam perpektifnya, dalam tulisanya ini Zirring memberikan perspektif yang netral.

Kelemahan dari tulisan Zirring adalah terlalu terfokus pada pergerakan tokoh dan kurang memberikan faktor-faktor lain yang berpengaruh bagi perjuangan kemerdekaan India. Dia mengidentikkan Liga Muslim dengan satu tokoh saja yaitu Ali Jinnah dan Partai Kongres dengan Gandhi, sehingga peran-peran lain kurang terangkat. Selain itu yang perlu dipahami bahwa faktor ekstern seperti India yang terlibat dalam Perang Dunia II antara tahun 1939-1947 juga turut menyertai suasana politik dalam negeri India dan memiliki dampak pada proses kemerdekaan India, namun ini justru tidak tersentuh dalam kajiannya.

Zirring mengabaikan aspek sosial dan budaya dalam tulisannya, padahal terbentuknya Pakistan juga tidak terlepas dari sentimen-sentimen komunal yang kuat berakar di masyarakat. Karena kajiannya terlalu fokus pada satu aspek saja yaitu Pakistan, sehingga kajiannya menjadi parsial. Menurut penulis seharusnya sejarah India pada periode kolonial Inggris harus mampu mempertemukan tiga perspektif utama yaitu India dan Pakistan, lalu ditambah dengan perspektif dari luar yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan dan mempunyai melihat permasalahan di India secara netral.

### 2.3. Kondisi Politik India dan Pakistan tahun 1947 setelah Pembagian

Kondisi politik India setelah terbagi menjadi dua negara dominion juga dibahas dalam buku-buku yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya. Namun, pada bagian ini akan dibahas beberapa karya literatur yang menurut penulis representatif untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam memahami kondisi India setelah pembagian pada Agustus 1947. Adapun yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah untuk memahami bagaimana dampak-dampak politik yang ditimbulkan dari pembagian India tahun 1947 bagi rakyat India dan Pakistan.

Gyanendra Pandey (2004) dalam berjudul *Remembering Partition Violence, Nationalism and History in India*, membahas mengenai dampak pembagian India-Pakistan pada tahun 1947 terhadap konflik politik-horizontal, dan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga sipil. Pandey memfokus kajiannya pada perpecahan dan kekerasan genosida yang terjadi di India, yang ditandai dengan berakhirnya sebuah rejim yaitu Inggris di India, dan lahirnya dua rejim yang baru yaitu negara India dan Pakistan.

Pandey mencoba untuk menginvestigasi momen-momen perpecahan, dan berbagai kekerasan yang terjadi saat sebuah negara mengklaim untuk mendapatkan legitimasi atas indetitas kemerdekaannya. Secara spesifik dalam buku ini dianalisis mengenai gerakan-gerakan dalam membangun populasi nasional. Pandey menggunakan konsep budaya (*culture*) dan sejarah (*history*) dalam konteks klaim atas kenegara-bangsaan (*nation-statehood*) dan pendirian negara bangsa (*nation-state*). Dalam prosesnya akan terlihat, bagaimana aspek



lokal muncul sebagai aspek nasional, dan sebaliknya aspek nasional ditampilkan sebagai aspek lokal dalam mendukung klaim berdirinya sebuah negara.

Pandey, mencoba memberikan sesuatu yang berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas mengenai pembagian India-Pakistan. Dia mengangkat kaitan antara komunalisme dan kekerasan yang berkembang di India pada masa sebelum dan sesudah pembagian. Pandey memaparkan mengenai kekerasan genosida yang biasanya menjadi isu sensitif dan kurang dibahas dalam berbagai tulisan umumnya. Hal ini dikarenakan data statistiknya yang tidak jelas dan juga berpotensi menimbulkan diskursus di dalam masyarakat antara Muslim dan Hindu di India (Pandey, 2004: 4). Menurut Pandey, sejarah perpecahan India-Pakistan lahir dengan dua wajah utama, antara perspektif yang setuju dengan gagasan pembentukan Pakistan, dan juga pihak-pihak yang memandang itu sebagai sebuah kegagalan bangsa dalam menjaga persatuannya.

Robert I Hardgrave dan Jr. Stanley A. Kochanek (1970), berjudul *India (Fourth Edition) Government and Politics in a Developing Nation*. Dalam bukunya Hargrave dan Kochanek membahas mengenai kondisi India setelah kemerdekaan. Penulis banyak memperoleh informasi mengenai berbagai dampak yang ditimbulkan dari pembagian India-Pakistan pada tahun 1947 bagi kondisi politik dalam negeri masing-masing negara setelah terpisah. Karya Hardgrave dan Kochanek ini sangat membantu penulis karena memberikan pemahaman dasar mengenai kondisi India setelah pembagian pada tahun 1947.

Kondisi India setelah terbagi menjadi dua negara dominion juga cukup banyak dibahas dalam buku Gzaznawi yang berjudul *Story of India; Aggression Against Pakistan* (1966). Dia adalah seorang penulis Muslim berkebangsaan

Pakistan yang bersifat Muslim sentris. Fokus utama dari tulisannya adalah mengenai agresi yang dilakukan oleh golongan Hindu India terhadap minoritas Muslim sejak zaman kolonial Inggris, masa pergerakan, sampai dengan konflik Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan pasca kemerdekaan 1947. Pembagian India-Pakistan pada tahun 1947 melahirkan permasalahan selanjutnya di kawasan-kawasan *princely states*, seperti yang terjadi di Kashmir ketika masing-masing negara baik Pakistan maupun Liga Muslim, mengklaim kawasan ini masuk dalam negaranya.

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap beberapa karya historiografi terdahulu dalam bab ini, menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan India tidak terlepas dari dua aktor utamanya yaitu Partai Kongres dan Liga Muslim. Proses historis yang terjadi antara tahun 1935 sampai dengan 1947 banyak menunjukkan interaksi politis di antara Inggris dengan kedua partai tersebut. Interaksi politik yang terjadi dalam periode 1935-1947 melahirkan banyak perspektif para sejarawan dalam mengkonstruksi perkembangan sejarah politik India. Namun, pada umumnya para penulis buku mengidentifikasi periode tersebut sebagai sebuah proses peralihan, dari rejim lama (kolonialisme Inggris) digantikan oleh bangkitnya rejim baru dengan munculnya dua negara yaitu India dan Pakistan.

Penulis mengidentifikasi bahwa terdapat tiga perspektif utama dalam penulisan sejarah India yang membahas mengenai Partai Kongres, Liga Muslim, dan pembagian India-Pakistan antara tahun 1935-1947. Pertama adalah perspektif Hindu yang banyak memunculkan mengenai peranan Partai Kongres dan mendukung terhadap Uni-India; kedua perspektif Muslim yang fokus pada

perjuangan Liga Muslim dalam mendirikan Pakistan dan mendukung terhadap pembagian India menjadi dua negara pada tahun 1947; terakhir perspektif yang terbentuk tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang turut menyertainya seperti dua perspektif sebelumnya. Pembahasannya cenderung netral namun biasanya subjektifitas masih dapat ditemukan dari ideologi penulis yang ikut terserap dalam tulisannya.

